

BAB IV KESIMPULAN

Dari berbagai paparan yang telah diuraikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia benar-benar dihadapkan pada suatu krisis yang sifatnya destruktif. Destruktif dalam artian disini adalah bahwa krisis ekonomi tersebut berhasil membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Keterpurukan ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti anjloknya nilai mata uang, besarnya hutang luar negeri, dan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi. Situasi krisis ini kemudian menimbulkan berbagai kekacauan terhadap tatanan ekonomi dan politik Indonesia yang telah dibangun oleh Soeharto dalam kurun waktu 32 tahun.

Pertama, krisis ekonomi yang terjadi membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun yang pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia mengalami delegitimasi. Menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat Indonesia lebih disebabkan karena pemerintah tidak dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan dari krisis tersebut. Singkatnya, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan keinginan yang kuat untuk mencari jalan keluar dari krisis.

Kedua, akibat dari kelambanan pemerintah tersebut, pada akhirnya membuat masyarakat dari berbagai elemen untuk bergerak dan menuntut agar terciptanya suatu pergantian rezim, karena rezim Soeharto sudah dianggap tidak lagi kredibel dan mampu menyelesaikan krisis. Hal ini dinyatakan dapat dilihat dari berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Tentu saja hal ini menimbulkan kekacauan yang luar biasa dan diperburuk dengan kejadian gugurnya empat mahasiswa Trisakti dalam suatu demonstrasi. Peristiwa ini lebih dikenal dengan Tragedi 12 Mei atau Mei Kelabu. Akibatnya, kerusuhan massa tidak dapat dicegah lagi, dan skala krisis meluas sehingga menjadi sebuah krisis social dan politik.

Ketiga, tidak berfungsinya berbagai institusi baik politik, social, ekonomi, dan hukum. Sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan institusi tersebut dalam mencari sebuah solusi bagi penyelesaian krisis yang skalanya sudah meluas. *Keempat*, lumpuhnya pemerintahan Soeharto yang kemudian ditandai dengan jatuhnya presiden Soeharto dari kursi presiden.

Dari berbagai persoalan tersebut, ada beberapa persoalan yang harus dibahas secara mendalam. Apa yang menjadi pemicu krisis tersebut, bagaimana krisis itu terjadi, dan bagaimana pemerintah Indonesia melakukan usaha untuk dapat keluar dari krisis tersebut. Dari paparan bab-bab sebelumnya kita telah mengetahui bahwa krisis yang terjadi memang tidak lepas dari peristiwa krisis ekonomi yang terjadi di Thailand pada tahun 1997. Jatuhnya nilai mata uang Baht menjadi suatu permulaan yang mengawali krisis-krisis yang terjadi di Asia karena adanya *contagion effect* (menular).

Di Indonesia, besarnya utang luar negeri jangka pendek menjadi pemicu terjadinya krisis yang berkepanjangan. Besarnya hutang jangka pendek yang dilakukan oleh pihak swasta untuk membiayai proyek jangka panjang turut merupakan salah satu penyebab krisis. Besarnya hutang jangka pendek tersebut kemudian menyebabkan suatu *current account deficit* yang pada gilirannya membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang luar negerinya dan membuat anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS. Begitu cepatnya krisis ekonomi terjadi, mata uang rupiah terus melemah hingga mencapai level 17.000 rupiah per dolar AS.

Menghadapi krisis ekonomi yang terjadi, pemerintah dituntut untuk mencari solusi yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis. Berbagai langkah ditempuh oleh pemerintah untuk dapat keluar dari krisis termasuk menggalang kerjasama dengan lembaga moneter internasional (IMF). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF dapat terealisasi pada tahun 1997 melalui LoI (*Letter of Intern*) pertama pada tanggal 31 Oktober 1997. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan bantuan dana sebesar 43 milyar dolar AS untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia.

Selain kerjasama yang dijalin dengan IMF, pemerintah juga mencoba mencari jalan lain dengan mencoba menerapkan teknik CBS. Walaupun teknik ini pernah berhasil dan efektif yang diterapkan oleh Argentina, namun sayangnya IMF dan AS tidak menyetujui penerapan sistem ini di Indonesia tanpa alasan yang logis. Lebih lanjut, teknik ini berhasil nilai mata uang Argentina pada tahun 1990-an yang pada masa itu Argentina sedang dilanda krisis ekonomi. Penerapan sistem ini mendapat tantangan dari AS dan IMF dengan ancaman tidak akan memberikan stimulus ekonomi kepada Indonesia. Tekanan-tekanan tersebut juga ditunjukkan dengan pembicaraan langsung Michael Camdessus dan Bill Clinton dengan Soeharto melalui telpon agar Soeharto tidak menerapkan teknik CBS. Hal inilah yang kemudian membuat posisi Indonesia lemah dan tidak mempunyai daya tawar yang kuat untuk melakukan diplomasi terhadap IMF maupun AS.

Dilihat dari berbagai kondisi yang ada pada masa krisis ekonomi 1997, terdapat berbagai persoalan yang dapat dianalisa. *Pertama*, adanya tekanan eksternal dari pihak-pihak luar. Robert Gilpin mendefinisikan bahwa ekonomi-politik global adalah interaksi dari pasar seperti aktor negara dalam hal ini adalah AS dan Indonesia, firma internasional seperti IMF. Interaksi antara aktor-aktor tersebut dapat direfleksikan melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut, khususnya kerjasama antara IMF dan Indonesia dalam hal penanganan krisis ekonomi. Gilpin juga menyatakan bahwa aktor negara masih merupakan aktor yang dominan dalam membuat keputusan utama dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Krisis yang dialami Indonesia, peran dan pengaruh IMF dirasakan sangat kuat sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari langkah-langkah yang dianjurkan oleh IMF. Peran dan pengaruh yang kuat dari IMF tersebut dapat dilihat dari berbagai persyaratan (*conditionality*) yang diajukan IMF dalam beberapa LoI kepada Indonesia agar Indonesia dapat mendapatkan bantuan ekonomi.

Kedua, kondisi perekonomian pada masa krisis 1997, diwarnai dengan berbagai tekanan internal. Kondisi internal ini dipengaruhi oleh berbagai

pertentangan antara kubu teknokrat dan kubu pendukung CBS. Kontroversi tentang penerapan CBS ini akhirnya berakhir dengan diurungkannya niat pemerintah untuk melakukan penerapan teknik penerapan CBS. Ada dua asumsi kuat untuk mengetahui mengapa IMF dan AS menjadi sangat dominan terhadap Indonesia terutama dalam hal penanganan krisis ekonomi. *Pertama*, adalah lemahnya daya tawar Indonesia terhadap IMF dan AS. Persoalan krisis ekonomi yang diperparah dengan krisis politik dan sosial serta pelanggaran HAM berat yang banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru membuat Indonesia tidak berdaya dalam menghadapi tekanan AS dan IMF. *Kedua*, lemahnya kapasitas otonom negara Indonesia.

Kedua tekanan yang bersifat internal dan eksternal yang pada akhirnya memberikan sumbangan terhadap diplomasi setengah hati Indonesia. Walaupun pada dasarnya berbagai tekanan yang datang dari kedua aktor tersebut membuat Indonesia tidak sepenuh hati menjalankan berbagai kebijakan yang dianjurkan oleh dua aktor tersebut kepada Indonesia. Dapat dikatakan diplomasi setengah hati memang pada dasarnya Indonesia dalam hal ini adalah Soeharto berusaha untuk menghindari tekanan dan ajuran-ajuran yang datang dari IMF maupun AS.

Namun dengan gencarnya tekanan yang datang dari eksternal maupun internal pada akhirnya membuat Soeharto terus melakukan kerjasama dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan IMF. Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain bantuan tersebut harus diterima, sebagai upaya untuk keluar dari kondisi krisis yang demikian hebat. Singkatnya, pada parameter diplomasi yang bersifat setengah hati tersebut, realisasi kebijakan pada akhirnya harus mau menerima hasil apapun kendatipun '*policy-result*' tersebut tidak memuaskan untuk salah satu pihak. Di lain pihak tekanan tersebut memang pada dasarnya adalah untuk membawa perekonomian Indonesia lebih liberal. Dengan demikian memang dapat dikatakan terdapat agenda tersembunyi dari pihak AS dan IMF yang bertujuan untuk membuka pasar Indonesia seluas-luasnya.

Lebih dari itu, terdapat beberapa harapan AS terhadap kondisi politik Indonesia. Jatuhnya Soeharto juga turut menghentikan praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Hal ini tentu saja membuka peluang kepada masyarakat banyak untuk lebih berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kondisi ini secara paralel juga terjadi pada semakin membaiknya penghormatan terhadap hak azasi manusia dan demokrasi yang ada di Indonesia.

Dilihat lebih jauh, kondisi ekonomi politik Indonesia pada tahun 1998-2004, memang sesuai dengan skenario AS yang menginginkan Indonesia agar melakukan berbagai liberalisasi di berbagai sektor perekonomian seperti perbankan dan perdagangan misalnya. Tercatat bahwa Pemilu tahun 2004 merupakan suatu Pemilu yang direspon positif oleh negara-negara Barat dan AS khususnya.